

**RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KOTA
PADANG PANJANG DAN KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH

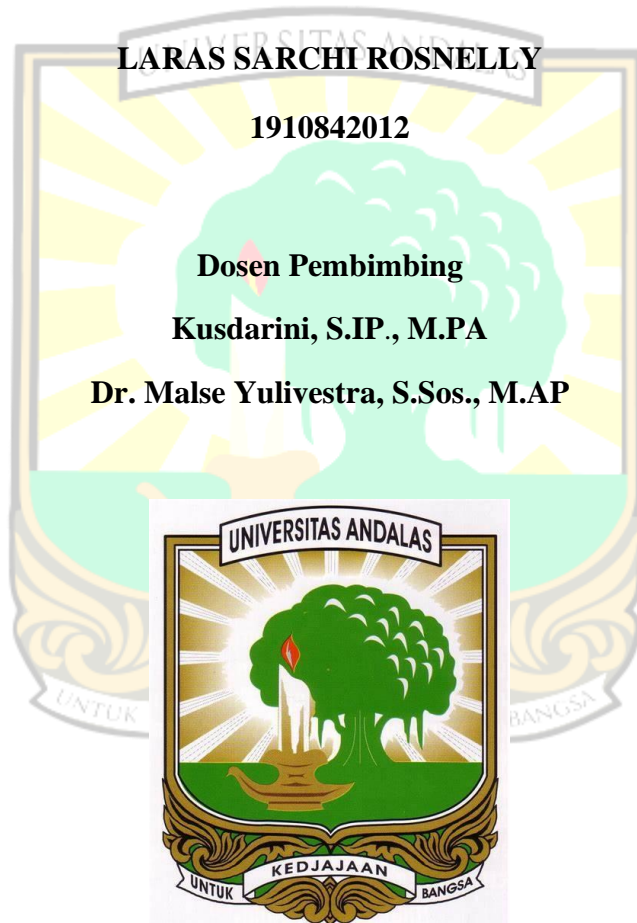
LARAS SARCHI ROSNELLY

1910842012

Dosen Pembimbing

Kusdarini, S.IP., M.PA

Dr. Malse Yulivestra, S.Sos., M.AP



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Laras Sarchi Rosnelly, NIM 1910842012, Resolusi Konflik Tapal Batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2026. Dibimbing oleh Kusdarini, S.IP, M.PA dan Dr. Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 141 halaman dengan referensi 9 buku teori, 4 buku metode, 9 jurnal, 10 dokumen, dan 4 website internet.

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Konflik tapal batas ini muncul akibat perbedaan persepsi dan kepentingan antar wilayah dalam penentuan batas administratif yang berdampak pada aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik tapal batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan teori resolusi konflik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini melibatkan pihak pemerintah daerah terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi lainnya yang berperan dalam proses penegasan batas wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengenalan, konflik telah diidentifikasi oleh kedua belah pihak, namun masih terdapat perbedaan pemahaman terkait dasar hukum dan peta yang digunakan. Pada tahap diagnosis, penyebab konflik meliputi perbedaan data spasial dan kepentingan administratif. Pada tahap menyepakati solusi, telah dilakukan berbagai forum koordinasi lintas sektor, namun belum mencapai kesepakatan final. Pada tahap pelaksanaan solusi, upaya yang dilakukan masih terbatas pada proses fasilitasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sementara itu, pada tahap evaluasi, proses resolusi konflik masih berjalan dan memerlukan tindak lanjut serta komitmen bersama dari kedua daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik tapal batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terselesaikan secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi data, serta peran aktif pemerintah pusat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

Kata kunci: resolusi konflik, tapal batas, batas daerah, Padang Panjang, Tanah Datar

ABSTRACT

Laras Sarchi Rosnelly, Student ID 1910842012, *Conflict Resolution of Boundary Disputes between Padang Panjang City and Tanah Datar Regency*, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2026. Supervised by Kusdarini, S.IP, M.PA and Dr. Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP. This thesis consists of 141 pages with references comprising 9 theoretical books, 4 methodological books, 9 journals, 10 documents, and 4 internet sources.

This research is based on boundary disputes that occur between the City of Padang Panjang and Tanah Datar Regency. This boundary conflict arises due to differences in perceptions and interests between the regions in determining administrative boundaries, which have an impact on aspects of governance and public services. This study aims to analyze the resolution of the boundary conflict between the City of Padang Panjang and Tanah Datar Regency using conflict resolution theory.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies. The informants in this study involve relevant local government agencies, such as the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), the Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), and other institutions involved in the boundary delineation process.

The results show that in the recognition stage, the conflict has been identified by both parties, but there are still differences in understanding regarding the legal basis and maps used. In the diagnosis stage, the causes of conflict include differences in spatial data and administrative interests. In the stage of agreeing on solutions, various cross-sector coordination forums have been conducted, but no final agreement has been reached. In the implementation stage, efforts are still limited to facilitation processes by the central government through relevant ministries. Meanwhile, in the evaluation stage, the conflict resolution process is still ongoing and requires further follow-up and mutual commitment from both regions.

The conclusion of this study is that the boundary conflict between Padang Panjang City and Tanah Datar Regency has not been fully resolved optimally. Therefore, improved coordination, data synchronization, and a more active role of the central government are needed to facilitate a sustainable conflict resolution process.

Keywords: conflict resolution, boundary dispute, regional boundaries, Padang Panjang, Tanah Datar